

Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Provinsisumatera Utara

Ridwan Zulmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hendra Harmain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis: ridwanzulmi11@gmail.com

Abstract: *On this occasion, I carried out quite in-depth experiments and research, the aim of which is to observe the preparation of financial reports and the preparation of Government Accounting Standards, namely an accounting method that is implemented when recording and presenting Government Financial Reports. Government Accounting Standards are published and stated in Government Regulation Number 71 of 2010. The Social Service Financial Report contains the mechanism for the Government's Social Service performance in one accounting period. This observation is useful in order to show how the presentation of the financial reports of the North Sumatra Province Social Service is truly in line with Government Regulation Number 71 of 2010. This system uses descriptive analysis which, as a fact, is put together and then classified and managed with special provisions so that it can be picked and described a decision. The results and description of this observation illustrate the presentation of financial reports at the North Sumatra Provincial Social Service in the 2022 budget year with Government Regulation No. 71 of 2010. It is recommended that in the next fiscal year the leadership of the North Sumatra Provincial Social Service illustrate that they have complied with and implemented PP No. 71 of 2010, in this way it can be seen that accountability and transparency of financial reports can be realized.*

Keywords: *financial reports, Government Accounting Standards, Financial Balance*

Abstrak: Didalam kesempatan kali ini, saya melakukan sebuah eksperimen dan penelitian yang cukup mendalam yang dimana pengujian pada saat ini tujuannya supaya dapat mengamati pembuatan laporan keuangan serta penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sebuah metode Akuntansi yang diimplementasikan ketika memelakukan pembutatan dan juga menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dimuat dan tertuang pada sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Dinas Sosial memuat tentang bagaimana mekanisme kinerja Pemerintah Dinas Sosial dalam satu periode Akuntansi. Pengamatan pada kali ini berguna supaya memperlihatkan bagaimana tentang penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara benar benar selaras pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Sistem ini dipakai analisis deskriptif yang sebagaimana sebuah fakta disatukan setelah ini pula diklasifikasikan dan di kelola denga ketentuan khusus agar dapat dipetik dan di gambarkan sebuah keputusan. Result dan gambaran dari pengamatan kali ini menggambarkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di bagian tahun anggaran 2022 dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Sebaiknya pada tahun anggaran berikutnya pimpinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menggambarkan telah mematuhi dan mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010, dengan demikian dapat diketahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan bisa terealisasi.

Kata kunci: laporan keuangan, Standart Akuntansi Pemerintah, Neraca Keuangan

PENDAHULUAN

Dinas sosial adalah lembaga milik kenegaraan yang dimana dibutuhkan guna membuat tugas-tugas pokok suatu pemerintah dalam elemen kesejahteraan sosial. Menurut peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyatuan Organisasi Dan Tata Kerja memiliki tugas pokok menyelesaikan urusan rumah tangga daerah dan tugas penyokongan dalam

elemen pemberitahuan binaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Sosial diberdayakan dengan adanya tenaga pekerja sosial (Januari, 2024). Pekerja sosial ialah petugas yang dioptimalkan pada bagian Departemen Sosial yang memiliki keterampilan spesialisasi bidang dan jiwa penyembuhan di bagian pengupayaan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial juga memiliki sistem akuntansi dan pencatatan laporan keuangan yang diaman ini di buat untuk pertanggungjawaban dari intitusi tersebut kepada negara, dalam hal ini dinas sosial diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan susuai standard yang berlaku sebagai mana mestinya (Hasan et al., 2024).

Dengan berjalannya waktu reformasi pada sebuah keuangan , *urgensinya* dilakukan pembaharuan guna mendorong supaya pada bidang keuangan suatu lembaga bisa berjalan bagaimana mestinya. contohnya perbedaan yang lumayan berpengaruh merupakan pembaharuan pada sebuah sistem akuntansi pemerintahan dengan tahapan ini akuntansi menciptakan sebuah kelolaan keuangan dengan termuat dari berbagai golongan untuk dipakai oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mentu & & Sondakh, 2016).

Upaya menghasilkan sistem penanganan yang sangat sempurna (good governance), aparatur keuangan yang dipakai Indonesia terus mengupayakan bermacam macam upaya guna mengoptimalkan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen keuangan negara (Syaroh, M., & Lubis, 2020). Dalam upaya untuk mengoptimalkan bentuk keterbukaan yang terang dan akuntabilitas manajemen keuangan di satu negara caranya dengan membuat pembaharuan dan pengemasan peraturan akuntansi pemerintah dalam bentuk standar akuntansi pemerintahan (SAP) karna ini berguna supaya mengasihikan unsur utama pada elemen pembuatan dan pelampiran laporan keuangan pemerintah ada dua pemerintah pusat maupun sebuah pemerintah pemerintah (Nasution & Junawan, 2019). SAP adalah persyaratan yang memiliki unsur ketangkasan dalam usaha penambahan kekuatan laporan keuangan pemerintah di tanah air kita.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan dasar dasar kredibel yang diimplementasikan dengan itu pembuatan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbentuk sebuah dan dimuat tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Erni et al., 2018). Dasar dasar yang di buat Akuntansi Pemerintah digunakan kerangka penyusunan laporan sebagai bentuk implementai anggaran realisasi APBN dibentuk sesuai laporan keuangan dengan jenis berbagai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Tumanggor, 2021). SAP adalah komponen akan memiliki ketangkasan *law* dibagian usaha

pengoptimalan kebaikan laporan keuangan pemerintah di tanah air. Pengelola berikutnya mempercayai tanggungjawab dan kerjaan pembentukan skala standar berikut pada organisasi standar pendirian yang sahkan oleh bentukan suatu peraturan tertulis presiden mengenai komite standar akuntansi pemerintahan (Syahputra & Lubis, 2022). Hukum yang berlaku telah ini sudah melekat dang lengket panduan yang wajib dipatuhi dengan suatu pendekatan Otonom Kota maupun wilayah di dalam membuat laporan keuangandengan bentuk akrual di muat bagian pemerintah kotanya.

Pembuatan keuangan diacuhkan berpanduan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai pokok pokok akuntansi di dalam sistem termuat pemerintahan yang selayaknya dan sebenarnya adalah berbentuk agenda pengoptimalan kebagusan laporan keuangan, supaya laporan keuangan bagaimana harus dimaksud mengalami peningkatan branding di gunakan giliran dan *next* akan terbentuk realisasi sebuah keterbukaan dan akuntabilitas manajemen keuangan pemerintah kota menjadi pemerintahan yang baik dan benar dapat terwujud secara terbaik (Rahmadhani et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Macam Penelitian

Pada pengamatan uji kali ini saya menerapkan jenis sistem kali ini dengan unsur penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengujian pembelajaran kasus serta studi pustaka. dalam penelitian Kualitatif ini adalah pengelolaan yang berlandaskan dasar penerangan sajak filosofi postpositivisme, biasanya dimanfaatkan peneiti guna meneliti pada kondisi obyek yang sifatnya murni , pada bagian ini peneliti adalah berada pada komponen utama , penggunaan data secara utuh , analisis data bersifat kualitatif .

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, jalan Sampul No.138, Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Waktu Penelitian mulai dari bulan Januari 2023 – Februari 2023

Tahapan penelitian Penelitian

Tahapan ataupun mekanisme gambaran unsur di lakukan pada pengamatan ini ialah :

1. Melakukan perencanaan judul pengamatan
2. Melakukan pendalaman subjek dan objek yang bakalan di amati
3. Melakukan penyatuan data yang kredibel untuk di kelolah dan di analisis
4. Membuat analisis data penelitian yang telah di kumpulkan
5. Selanjutnya membuat kesimpulan dan saran guna menjadi intisari dari penelitian ini

Sumber Data

1. Dalam hal mengamatan kali ini saya memakai data primer dimana data ini di defenisikan sebagai acuan data yang di dapat dan di proleh secara langsung menghasilkan data yang di baca untuk pengumpul data.
2. Dalam hal ini peneliti memakai data sekunder diaman data ini di definisikan sebagai acuan datayang kurang langsung mengasihikan data kepada bagian pengasih data, contoh melalui orang lain seperti berkas file dan sejenisnya.

Metode Analisis Data

Pada penelitian kali ini saya menerapkan sistem amat analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah penerangan deskriptif yaitu sistem kegunaan pada aturan dilakukan secara metode penyatuan , menyajikan, dan menganalisa data supaya menghasilkan pandangan sebuah yang jelas mengenai gambaran laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Susunan pembentukan pada dalam organisasi dan pola kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang memberikan pengetahuan tentang Bagian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Memuat ketangkasan pada intinyaa menguji formulasi dan perealisasi melakukan dan memuat administratif layanan, pengasihian pembelajaran secara manual teknis , serta pemantauan berkala objek , evaluasi serta dengan penggunaan tanggungan dibidang rehabilitas sosial. Dengan mekanisme tersebut mejadi pokok yang dapat memberikan dampak Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan anak jalanan di Provinsi Sumatera Utara . Adapun peran Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dengan menjalankan amanah dan tugas pokok sebuah devisian dalam tanggapan tangguhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di haruskan penerapan kerjaan melaksanakan tuntutan upaya pemerintah daerah berlandaskan naluri keiklasan dan kerjaan peramalan dibidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu SKPD yang terletak pada Sumatera Utara.

Tahapan penyusunan akuntansi keuangan biasanya terinci dahulu tahapan awal pencatatan, penggolongan atau penyatuan dan tahapan pelaporan. Sama rupanya dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Sosial masih bernalurikan keunggulan laporan keuangan berlandaskan dasar penerapan Cash Towards Accrual dibagian mana terdpat halnya Cuma memberikan 2 laporan keuangan yaitu neraca saldo dan laporan realisasi dana Laporan Realisasi AnggaranLRA (Laporan Realisasi Anggaran) definisinya merupakan sejenis laporan

yang menggambarkan pengakuliasian antara realisasi pendapatan dengan belanja dengan perhitungan matematika pendapatan dan pokok anggarannya yang telah diputuskan dimula tahun. Laporan Realisasi dana awal Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara masuk disini gambaran laporan keuangan memiliki elemen elemen berupa nominal dalam anggaran serta perwujudan . pendapatan Klasifikasi belanja berdasarkan golongan belanja disini merangkap Belanja dana sert Belanja anggaran.

Neraca Neraca saldo disini ialah gambaran yang memuat seluruh macam nama pos beserta saldo keseluruhan dari setiap transaksi . Laporan ini dibentuk dan sisesuaikan secara terstruktur sepakat dengan kode transaksi yang di tarik melalui dari buku besar lembaga pada sekala tertentu.

Neraca Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berisikan gambaran arena keuangan tentang polarisasi harta , keharusan , dan juga ekuitas anggaran . Penggolongan aset terwujud dari harta likuidasi dan harta tidak lancar. Salah satu bentuk harta golongan untuk harta yang secara likuidasi mungkin karna disini diaktualisasikan secepatnya untuk diwujudkan di analisis secara matang dan terarah atau dibentuk untuk tujuan dalam kurun tertentu waktu 12 bulan dimulai awal tanggal pemberian atau persediaan. Harta yang tidak lancar dimasukan ataupun di satukan melalui penanaman kurun waktu yang panjang, harta tetap, anggaran cadangan, dan harta pokok lainnya. Penanaman waktu yang jangka panjang dibelah atas Investasi yang tidak selamanya dan penanaman modal yang pemanen. Penyatuan kedalam yang singkat jika diharapkan terbayar (masuk waktu laksana pembayaran) dalam jangka kuang lebih 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Keharusan yang sesamanya digolongkan sebagai tempo bentuk jangka yang relatif lama , penjenisan modal anggaran mencakup ruang ekuitas dana cair (dan juga SILPA), modal data dana penanaman akuntansi dan modal dana simpanan .

Kegunaan Persiapan: Neraca saldo penyajian pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu lembaga. Fungsi Pembanding: Laporan ini digunakan untuk acuan agar tidak melakukan kesalahan pada saat memasukan atau pemindahbukuan ke kolom debit dan kredit buku besar.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) definisinya merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penjelasan dan daftar terinci atau analisa pada nilai suatu pos yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka penyajian yang memadai.

Kegunaan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah untuk informasi tambahan dan penjelas tentang informasi keuangan yang sudah di buat . Catatan atas laporan keuangan adalah salah satu bagian isi dari laporan keuangan.

Pada bagian ini catatan atas laporan keuangan supaya bisa digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
4. Masalah dan rintangan yang dihadapi ketika mau mencapai target
5. Informasi mengenai pokok dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipakai dan diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
6. Rincian dan gambaran masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi yang diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum diberikan pada lembar muka laporan keuangan;
8. Informasi lainnya yang dibutuhkan pada penyajian yang wajar, yang tidak dilampirkan pada lembar muka laporan keuangan.

Dampak mengenai hasil penelusuran ini ditemukan sesungguhnya Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sedang mengadopsi PP Nomor 24 Tahun 2005 (caso to accrual) disini juga tidak mengadopsi PP 71 Tahun 2010 (accrual basis). Berlandaskan asas Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai salah satu gambaran bentuk laporan keuangan, bentuk skala Laporan Keuangan Pemerintah kota termuat tujuh laporan yaitu: (1) Neraca saldo disesuaikan dengan baik , (2) Laporan kenyataan Anggaran, (3) Laporan Perubahandana , (4) Laporan kegiatan lembaga (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Padahal Dinas Sosial Sumatera Utara Cuma memakai menyajikan Laporan terlaksananya kewujudan Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi inipada penyajian titik laporan dengan ini Neraca saldonya , Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dampaknya inilah pengamatan disini kami teruntuk dilaksanakan secara matang dan terukur dengan Aidil (2018) dengan topik implementai Penerapan pokok Akuntansi perusahaan dan lembaga dengan dasar Akrual dalam penampilan Laporan Keuangan Pada kota Batam menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam belum menerapkan PP.71 Tahun 2010, terletak deteksi kesenjangan teori yaitu hambatan di sekala kematangan berupa dimana kita ketahui kurangnya kesiapan manusianya untuk mengambil ilmunya Dari pengamatan ini didapatkan

kesimpulan yang valid juga Udin (2019) dengan topik pembahasan penggambaran Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara si tarik garis lurus tentangnya yaitu laporan keuangan Dinas Sosial Sumatera Utara masih tidak sejalan pada PP.71 Tahun 2010.

Keputusan pada uji pengamatan yang dilaksanakan dan dikerjakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengenai cakupan gambaran laporan keuangan tersusun dari Laporan kenyataan Anggaran, Neraca saldonya dan Catatan atas Laporan Keuangan, *next* di sesuaikan kecakapannya pada bentuk akurat PP Nomor 71 Tahun 2010 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada pokok asas Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan penyajian Pendapatan dan Belanja. Dengan demikian Dinas Sosial belum mengdopsi kode pemindahan dan nominal tertentu karena dalam PP 71 tahun 2010 Transfer merupakan biaya uang dari satuan anak perusahaan pelaporan ke satuan anak perusahaan pada umumnya laporkan halnya dengan contoh penggunaan uang anggaran pemulihan pada pemerintah kota dan penghasilan yang dibagi bagikan oleh pemerintah kota. Padahal pengeluaran ialah semua proses jual beli pengelolaan keuangan pemerintah, baik pengeluaran secara menyeluruh maupun pendapatan secara menyeluruh, yang seharusnya digunakan atau didapatkan kembali oleh perusahaan tertentu padahal disini pengelolaan dana pemerintah yang pokoknya ditujukan guna merondokan kekurangan dan atau mengoptimalkan kelebihan keuntungan sebuah dana.

Dibagian pada Saldo Dinas Sosial tahun implementasi dana 2022 Provinsi Sumatera Utara bagian utama meliputi adopsi kepatuhan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penggambaran harta sudah dibuat mengenai pandangan asumsi penggolongan harta likuidasi dan harta tidak lancar. Penyajian harusnya sesudah dibuat sesuai dengan panduan menurut penggolongan kewajiban jangka yang cukup lama dan kewajiban jangka pendek. Pada bagian ini pengelompokan modal dibuat berbeda beda berisikan modal anggaran likuidasi, modal penanaman dan ekuitas yang bersifat anggaran cadangan belum memenuhi syarat dan ketetapan PSAP No. 1 ayat 84 dalam PP 71 Tahun 2010 padahal memuat seluruh harta dan kepunyaan pemerintah yang berisikan tentang selisih antara harta dan utang pada sebuah odal awal. Di bagian ini Catatan atas Laporan Keuangan seluruh satuan anak perusahaan harus menyiapkan akuntansi anak merupakan satu kesatuan pengutuhan yang tidak lepas dengan laporan keuangan dengan kegunaan yang sama. Catatan atas Laporan Keuangan ditujukan supaya laporan keuangan mudah dimengerti sama penerawang dengan cara masif, enggan terpantau pada saat di baca oleh orang tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang mendeskripsikan terutama sebuah pendahuluan, pendapatan yang besar, *policy* akuntansi yang lumayan mempengaruhi dan pendeskripsian ke de pelaporan keuangan sudah menrarahkan amanatan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No empat..

KESIMPULAN.

Laporan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berbentuk pelaporan hasil Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pada sekama dana 2022 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara penggambaran pelaporan dananya tidak mencerminkan sesuai aturan yang ada di Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga sedang menganut sistem aturan yang di buat Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

DAFTAR REFERENSI

- Hasan, F., Mahmud, M., Panigoro, M., Hasiru, R., Pendidikan, J., Universitas, E., & Gorontalo, N. (2024). Volume 6 No 1 January 2024 GOTONTALO setiap tahunnya . Adapun Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 6(1), 76–91.
- Januari, N. (2024). Analisis Prosedur Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Daffa Roghib Aqwa Naser Daulay Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Nasution, D. A. D., & Junawan. (2019). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. “Peningkatan Kemandirian Teknologi Dan Bisnis Untuk Pembangunan Wilayah Pesisir” Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis Analisis, Lcm, 270–276.
- Rahmadhani, W. A., King, D., Ginting, E. M. B., Fernandes, Sijabat, D., Raviqy, R., & Amin, M. (2022). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 1167–1182. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2979>
- Syahputra, D., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2947–2954.
- Syaroh, M., & Lubis, I. (2020). Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa. *Jurnal Publik Reform*, 1(2), 95–101.